



PEDOMAN AKADEMIK DAN KURIKULUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

PERIODE 2023–2028



PEDOMAN AKADEMIK DAN KURIKULUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Status Dokumen

Dokumen ini merupakan penyajian editorial profesional dan siap cetak yang disusun berdasarkan Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Hukum periode 2023–2028. Ruang lingkupnya berfokus pada arah akademik, kurikulum, capaian pembelajaran, struktur mata kuliah, rancangan pembelajaran, dan luaran akademik.

SURABAYA
2023–2028



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

NOMOR: 67.1/UN63.6/SKEP/2023

TENTANG

DOKUMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR

Konsiderans

Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut visi, misi, tujuan, strategi, dan nilai universitas serta kebutuhan penyelenggaraan kurikulum Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister (S2).

Diktum

KESATU: Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan.

KEDUA: Keputusan Dekan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP 196801161994032001



LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGENDALIAN DOKUMEN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr. Teddy Prima Anggriawan, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.	Koordinator Program Studi Magister Hukum		01 Desember 2023
Pemeriksa	Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.	Dosen Program Studi Magister Hukum		01 Desember 2023
Penetapan	Eko Wahyudi, S.H., M.H.	Wakil Dekan I Fakultas Hukum		01 Desember 2023
Pengendalian	Zuhda Mila Fitriana, S.H., M.H.	Ketua Penjaminan Mutu Fakultas		01 Desember 2023

Catatan Penggunaan

Pedoman ini menjadi rujukan internal bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan dalam memahami desain akademik Program Studi. Ketentuan administratif yang tidak diatur secara khusus dalam pedoman ini mengikuti peraturan universitas dan fakultas yang berlaku.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Pedoman Akademik dan Kurikulum Program Studi Magister Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dapat disajikan sebagai rujukan akademik yang sistematis, informatif, dan mudah digunakan.

Pedoman ini menegaskan komitmen Program Studi untuk menyelenggarakan pendidikan hukum yang bermutu, berkarakter bela negara, berorientasi pada capaian pembelajaran, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan hukum nasional dan global.

Substansi pedoman mencakup identitas dan arah pengembangan Program Studi, landasan kurikulum, visi dan misi, profil lulusan, Tujuan Pendidikan Program Studi, Capaian Pembelajaran Lulusan, Body of Knowledge, struktur mata kuliah, rancangan pembelajaran, evaluasi kurikulum, serta luaran akademik berupa seminar proposal, publikasi ilmiah, dan tesis.

Pedoman ini diharapkan memperkuat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan proses pendidikan sekaligus menjadi instrumen pengembangan mutu yang adaptif dan berkelanjutan. Saran dan masukan konstruktif tetap diperlukan agar penyelenggaraan Program Studi senantiasa relevan dan berdampak.

Surabaya, Desember 2023
Program Studi Magister Hukum



PANDUAN CEPAT PEDOMAN

4	54	4	8	3
Semester	SKS*	Konsentrasi	CPL	Profil Lulusan

*Jumlah 54 SKS merupakan akumulasi struktur kurikulum pada dokumen sumber: 12 SKS mata kuliah wajib dasar, 28 SKS konsentrasi, serta 14 SKS luaran akademik wajib.

Cara Menggunakan Pedoman

Pengguna	Fokus Pemanfaatan
Mahasiswa	Gunakan Bab 5 dan Bab 6 untuk memahami capaian lulusan, pilihan konsentrasi, distribusi mata kuliah, dan luaran akademik yang harus dipenuhi.
Dosen	Gunakan Bab 4, Bab 5, dan Bab 7 sebagai dasar penyelarasan CPL, CPMK, metode pembelajaran, asesmen, dan RPS.
Pengelola Program Studi	Gunakan Bab 3, Bab 4, dan Bab 8 sebagai rujukan evaluasi kurikulum, penjaminan mutu, tracer study, dan perbaikan berkelanjutan.
Pemangku Kepentingan	Gunakan profil lulusan, TPP, dan CPL untuk memahami orientasi kompetensi serta kontribusi lulusan Program Studi.



DAFTAR ISI

Bagian	Judul	Hal.
BAB 1	Identitas dan Ruang Lingkup	6
BAB 2	Landasan dan Arah Pengembangan Akademik	8
BAB 3	Visi, Misi, Tujuan, dan Penjaminan Mutu	10
BAB 4	Profil Lulusan, TPP, dan CPL	12
BAB 5	Body of Knowledge dan Struktur Kurikulum	15
BAB 6	Distribusi Mata Kuliah dan Rencana Studi	19
BAB 7	Rancangan Pembelajaran Semester	23
BAB 8	Luaran Akademik dan Penyelesaian Studi	25
LAMPIRAN A	Deskripsi Bahan Kajian/Mata Kuliah	27
LAMPIRAN B	Matriks Keterkaitan PL, TPP, dan CPL	33
LAMPIRAN C	Contoh RPS Mata Kuliah	36



1

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

BAB 1 IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

1.1 Identitas Program Studi

Unsur	Keterangan
Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Fakultas	Hukum
Program Studi	Magister Hukum
Status Akreditasi	Terakreditasi Sementara (hingga 2029)
Alamat	Jl. Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya
Telepon	(031) 8706369
Laman	Fakultas Hukum – UPN “Veteran” Jawa Timur
Periode Kurikulum	2023–2028

1.2 Kedudukan Pedoman

Pedoman ini merupakan dokumen operasional akademik yang menyajikan substansi kurikulum dalam format yang lebih terstruktur dan mudah digunakan. Pedoman berfungsi sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran, penyelarasan capaian pembelajaran, pemilihan konsentrasi, pengembangan RPS, evaluasi kurikulum, dan pemenuhan luaran akademik.

1.3 Ruang Lingkup

- arah pengembangan akademik dan nilai institusional;
- visi, misi, tujuan, dan Tujuan Pendidikan Program Studi;
- profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan;
- Body of Knowledge dan struktur bahan kajian;
- distribusi mata kuliah per semester dan konsentrasi;
- prinsip penyusunan RPS dan pelaksanaan pembelajaran;
- evaluasi kurikulum, tracer study, dan penjaminan mutu;
- luaran akademik berupa seminar proposal, publikasi ilmiah, dan tesis.

1.4 Prinsip Penyelenggaraan Akademik

Berkarakter Bela Negara

Setiap proses akademik menginternalisasikan integritas, nasionalisme, tanggung jawab sosial, dan pengabdian kepada bangsa.

Berorientasi Capaian

Kurikulum disusun berdasarkan keterkaitan profil lulusan, TPP, CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, metode pembelajaran, dan asesmen.

**Adaptif dan Kontekstual**

Pembelajaran merespons dinamika hukum, transformasi digital, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan nasional dan global.

Ilmiah dan Etis

Riset dan publikasi dilaksanakan secara kritis, inovatif, bertanggung jawab, dan menjunjung integritas akademik.

Berkelanjutan

Kurikulum dievaluasi secara periodik dan formatif melalui data, umpan balik, IKM, tracer study, dan peninjauan RPS.



2

LANDASAN DAN ARAH PENGEMBANGAN AKADEMIK

BAB 2 LANDASAN DAN ARAH PENGEMBANGAN AKADEMIK

Pengembangan kurikulum Program Studi Magister Hukum dibangun atas landasan nilai, filosofis, historis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Keseluruhan landasan ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga relevan dengan kehidupan masyarakat, pembangunan nasional, dan perkembangan hukum global.

2.1 Nilai Universitas

Pengembangan kurikulum berakar pada nilai bela negara sebagai identitas institusional dan kerangka etik penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Nilai utama meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, kerelaan berkorban, serta kemampuan awal bela negara.

Nilai pendukung mencakup disiplin, kejujuran, kreativitas, keunggulan, kejujuran, religiusitas, toleransi, kerja keras, inovasi, kemandirian, demokrasi, penghargaan terhadap prestasi, komunikasi efektif, kepedulian sosial-lingkungan, dan tanggung jawab.

2.2 Landasan Filosofis

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber nilai, norma, dan prinsip dasar pendidikan hukum.

Pendidikan hukum diarahkan pada keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, integritas, serta kepekaan etis.

Pendekatan interdisipliner dan kontekstual digunakan untuk membentuk kemampuan analitis tingkat lanjut dan solusi hukum yang adil serta berkelanjutan.

2.3 Landasan Historis

Program Studi bertumbuh dari tradisi UPN “Veteran” Jawa Timur yang berakar pada semangat perjuangan dan pengabdian kepada bangsa.

Warisan patriotisme menjadi dasar pendidikan hukum yang berorientasi pada kepentingan nasional dan pembangunan hukum berkeadilan.

2.4 Landasan Sosiologis

Hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan nilai, norma, dan dinamika masyarakat.

Pembelajaran berbasis kasus, diskusi kritis, dan analisis kontekstual digunakan agar mahasiswa mampu merespons persoalan sosial secara argumentatif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial.



2.5 Landasan Psikologis

Kurikulum menyeimbangkan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan konatif melalui pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

Problem-based learning, kolaborasi akademik, dan refleksi kritis mendorong motivasi intrinsik, kemandirian, kreativitas, inovasi, dan pembelajaran sepanjang hayat.

2.6 Urgensi Program Studi

Program Studi menjawab kompleksitas persoalan hukum nasional dan global, khususnya keamanan nasional, kebijakan publik, hak asasi manusia, hukum bisnis, dan hukum internasional.

Kurikulum berorientasi Outcome-Based Education dan Kampus Berdampak untuk menguatkan riset hukum yang bermutu, pengabdian berbasis pemecahan masalah, dan daya saing lulusan.

2.7 Landasan Hukum

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
17. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
20. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister (S2).

Prinsip Kehati-hatian

Landasan hukum dalam pedoman ini mengikuti dokumen kurikulum yang ditetapkan pada 1 Desember 2023. Pemutakhiran regulasi administratif dilaksanakan melalui mekanisme peninjauan dokumen oleh universitas dan fakultas.



3

VISI, MISI, TUJUAN, DAN
PENJAMINAN MUTU

BAB 3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN PENJAMINAN MUTU

3.1 Visi Fakultas Hukum

Visi Fakultas

Menjadi Fakultas Unggul Berkarakter Bela Negara dalam Menghasilkan Lulusan dalam Bidang Hukum Secara Teoritik dan Praktis.

3.2 Visi Program Studi

Visi Program Studi

Menjadi program studi magister hukum unggul dan berkarakter, berorientasi bela negara, melahirkan ahli hukum berintegritas dan adaptif dalam menghadapi tantangan global.

3.3 Misi Program Studi

21. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan hukum tingkat lanjut secara teoritik dan praktis yang inovatif dan berkualitas tinggi sesuai dinamika masyarakat serta perkembangan hukum nasional dan global.
22. Mengembangkan budaya riset hukum yang unggul dan berdaya guna pada isu strategis nasional dan internasional dengan berlandaskan nilai bela negara.
23. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu hukum yang beretika, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kesadaran serta kepatuhan hukum.
24. Menyelenggarakan tata kelola Program Studi yang bersih, transparan, dan akuntabel untuk mendukung sumber daya manusia serta sarana-prasarana pembelajaran.
25. Mengembangkan kerja sama strategis dengan lembaga hukum, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan pada tingkat nasional maupun internasional.
26. Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan karakter, integritas, dan kepemimpinan hukum dalam semangat bela negara.

3.4 Tujuan Program Studi

27. Menghasilkan lulusan dengan pemahaman mendalam terhadap teori, prinsip, dan sistem hukum serta kemampuan menerapkannya secara kritis pada persoalan hukum kompleks.
28. Menghasilkan ahli hukum yang memiliki kemampuan analitis, kritis, dan metodologis tingkat lanjut dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.
29. Menghasilkan penelitian hukum bermutu dan berdaya guna sebagai kontribusi pada rekayasa sosial dan pembaruan hukum.
30. Mengembangkan spesialisasi keilmuan hukum sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum.
31. Menghasilkan lulusan berintegritas, beretika profesi, berkesadaran bela negara, serta mampu menjadi pemimpin dan pengambil kebijakan.
32. Meningkatkan peran Program Studi dalam pengabdian kepada masyarakat.
33. Mewujudkan tata kelola Program Studi yang akuntabel dan berkelanjutan.

34. Menghasilkan jejaring kerja sama produktif dengan lembaga hukum, pemerintah, dunia usaha, dan lembaga internasional.

3.5 Evaluasi Kurikulum

Karena Program Studi baru memperoleh izin operasional pada Desember 2023 dan belum memiliki lulusan pada saat dokumen disusun, evaluasi kurikulum belum berbasis umpan balik lulusan dan pengguna lulusan. Evaluasi tetap dilaksanakan melalui mekanisme internal yang terstruktur dan terintegrasi di tingkat fakultas.

- audiensi akademik pada awal tahun ajaran dengan melibatkan pimpinan, pengelola Program Studi, dosen, dan pemangku kepentingan internal;
- survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk menilai layanan akademik, tata kelola, proses pembelajaran, serta dukungan sarana dan prasarana;
- peninjauan RPS, metode pembelajaran, asesmen, dan umpan balik mahasiswa;
- penerapan case-based learning, problem-based learning, diskusi isu hukum aktual, dan teknologi pembelajaran digital;
- perbaikan berkelanjutan berdasarkan ketercapaian CPL dan CPMK.

3.6 Tracer Study

Tracer study direncanakan dilaksanakan secara sistematis setelah lulusan pertama dihasilkan. Instrumen diarahkan untuk mengukur masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja dengan kompetensi lulusan, serta kepuasan pengguna lulusan. Hasilnya menjadi masukan untuk penyempurnaan kurikulum dan proses pembelajaran.

3.7 Siklus Penjaminan Mutu Akademik

Tahap	Implementasi
Penetapan	Menetapkan profil lulusan, TPP, CPL, struktur kurikulum, standar pembelajaran, dan standar luaran akademik.
Pelaksanaan	Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPS, metode aktif, asesmen terukur, dan dukungan teknologi.
Evaluasi	Menilai ketercapaian CPL/CPMK melalui asesmen, umpan balik mahasiswa, IKM, dan audit akademik.
Pengendalian	Menindaklanjuti ketidaksesuaian dan risiko akademik melalui rapat evaluasi serta perbaikan dokumen.
Peningkatan	Memutakhirkan kurikulum, RPS, metode pembelajaran, jejaring, dan layanan berdasarkan hasil evaluasi.



4

PROFIL LULUSAN, TPP,
DAN CPL

BAB 4 PROFIL LULUSAN, TPP, DAN CPL

4.1 Profil Lulusan

Lulusan Program Studi Magister Hukum dibekali pemahaman mendalam mengenai hukum pertahanan, keamanan, dan bela negara; kemampuan analisis hukum tingkat lanjut; kepemimpinan moral; komunikasi profesional; serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika hukum.

PL-1 • Ahli dan Praktisi Hukum Keamanan Nasional

Mampu berperan sebagai penasihat hukum dan praktisi profesional di bidang hukum keamanan nasional dan pertahanan negara, termasuk dalam lingkungan militer, lembaga pemerintahan, perusahaan strategis, serta sektor industri pertahanan dan keamanan.

- Penasihat hukum militer
- Praktisi hukum keamanan nasional
- Aparatur pada lembaga hukum, pertahanan, dan keamanan
- Penasihat hukum pada perusahaan strategis

PL-2 • Analisis Kebijakan dan Advokat Hukum Nasional-Internasional

Mampu menganalisis, merumuskan, dan mengadvokasi kebijakan hukum di bidang keamanan nasional, hak asasi manusia, dan hukum internasional dengan menjunjung tinggi prinsip bela negara, keadilan, dan supremasi hukum.

- Peneliti dan analisis kebijakan keamanan
- Advokat hak asasi manusia
- Praktisi hukum internasional
- Penasihat hukum organisasi internasional

PL-3 • Akademisi dan Peneliti Hukum

Mampu mengembangkan dan mentransformasikan ilmu hukum melalui pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah serta berkontribusi pada pengembangan keilmuan hukum, khususnya hukum keamanan nasional, hukum internasional, dan kebijakan publik.

- Pengajar/dosen
- Peneliti hukum
- Analisis akademik berbasis riset



4.2 Tujuan Pendidikan Program Studi

Kode	Deskripsi
TPP-1	Menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam dan komprehensif terhadap teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta metodologi penelitian hukum tingkat lanjut, dengan kemampuan analitis dan kritis untuk memecahkan permasalahan hukum di bidang keamanan nasional, hukum nasional, dan internasional.
TPP-2	Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional dan spesialisasi di bidang hukum keamanan nasional, hukum internasional, hak asasi manusia, dan kebijakan publik, didukung keterampilan komunikasi, negosiasi, dan jejaring profesional guna berperan sebagai praktisi, penasihat hukum, dan analis kebijakan.
TPP-3	Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu hukum melalui penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum dan pendidikan hukum pada tingkat nasional dan global.

4.3 Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode	Rumusan CPL
CPL-1	Mampu menunjukkan integritas profesional dan etika hukum yang tinggi, dengan berpedoman pada prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek praktik hukum.
CPL-2	Mampu memiliki pemahaman komprehensif dan mendalam tentang prinsip dan teori hukum, serta menerapkannya dalam praktik, termasuk pengetahuan mengenai sistem hukum internasional dan perbandingan hukum.
CPL-3	Mampu menganalisis masalah hukum secara kritis, mengembangkan solusi berdasarkan penalaran logis dan etis, serta mengevaluasi implikasi hukum dari berbagai situasi kompleks.
CPL-4	Mampu melakukan penelitian hukum yang inovatif dan etis serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui hasil yang diakui pada tingkat nasional maupun internasional.
CPL-5	Mampu berkomunikasi secara efektif dan persuasif dalam berbagai konteks profesional serta bekerja sama dengan tim interdisipliner untuk mencapai solusi hukum yang optimal.
CPL-6	Mampu beradaptasi dengan perubahan dalam bidang hukum dan teknologi serta berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan.
CPL-7	Mampu memimpin dan mengelola proyek hukum secara efektif dengan memadukan visi strategis dan tindakan praktis.
CPL-8	Mampu menunjukkan pemahaman yang luas tentang isu hukum global, menghargai keberagaman budaya, dan beroperasi dalam lingkungan hukum internasional dengan sensitivitas dan profesionalisme.



4.4 Hubungan Profil Lulusan, TPP, dan CPL

Setiap profil lulusan didukung oleh ketiga TPP. Seluruh CPL juga mendukung TPP-1, TPP-2, dan TPP-3. Hubungan tersebut menunjukkan desain kurikulum yang terpadu: integritas dan keilmuan, kompetensi profesional, serta kemampuan penelitian dan diseminasi dikembangkan secara simultan.

Profil Lulusan	TPP-1	TPP-2	TPP-3
PL-1 • Ahli dan Praktisi Hukum Keamanan Nasional	✓	✓	✓
PL-2 • Analisis Kebijakan dan Advokat Hukum Nasional-Internasional	✓	✓	✓
PL-3 • Akademisi dan Peneliti Hukum	✓	✓	✓



5

BODY OF KNOWLEDGE
DAN STRUKTUR
KURIKULUM

BAB 5 BODY OF KNOWLEDGE DAN STRUKTUR KURIKULUM

5.1 Body of Knowledge

Body of Knowledge Program Studi Magister Hukum mencakup kedalaman dan keluasan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang diperlukan untuk menjalankan praktik hukum secara bertanggung jawab.

Pengembangan bahan kajian mengintegrasikan dimensi teoritis, metodologis, dan aplikatif serta mempertimbangkan praktik hukum nasional dan internasional.

Kurikulum diarahkan untuk memperkuat kapasitas lulusan dalam menganalisis, merumuskan, dan menyelesaikan persoalan hukum kompleks pada tingkat nasional maupun global.

Bahan kajian dikembangkan secara adaptif dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan kontemporer, serta ekspektasi dunia kerja.

5.2 Arsitektur Kurikulum

12	28	14	54
SKS Wajib Dasar	SKS Konsentrasi	SKS Luaran Akhir	SKS Total

Struktur kurikulum ditempuh dalam empat semester. Mahasiswa menyelesaikan enam mata kuliah wajib dasar pada semester pertama, memilih salah satu konsentrasi pada semester kedua dan ketiga, serta memenuhi luaran akademik wajib pada semester keempat.

5.3 Kelompok Bahan Kajian

Kelompok	Jumlah Mata Kuliah	Total SKS
Mata Kuliah Wajib Dasar	6	12
Konsentrasi Hukum Bisnis	14	28
Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana	14	28
Konsentrasi Hukum Kesehatan	14	28
Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik	14	28
Luaran Akademik Wajib	3	14



5.4 Daftar Mata Kuliah per Kelompok

Mata Kuliah Wajib Dasar

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK1	Politik Hukum	2
2	BK2	Teori Hukum	2
3	BK3	Sosiologi Hukum	2
4	BK4	Filsafat Hukum	2
5	BK5	Metodologi Penelitian Hukum	2
6	BK6	Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara	2

Konsentrasi Hukum Bisnis

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK7	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2
2	BK8	Hukum Pasar Modal	2
3	BK9	Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	2
4	BK10	Kapita Selekta Hukum Perdata	2
5	BK11	Hukum Perdagangan Internasional	2
6	BK12	Hukum Ketenagakerjaan	2
7	BK13	Hukum Investasi	2
8	BK14	Hukum Perbankan	2
9	BK15	Hukum Kontrak Dagang Internasional	2
10	BK16	Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen	2
11	BK17	Perbandingan Hukum Kontrak	2
12	BK18	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2
13	BK19	Kapita Selekta Hukum Jaminan	2
14	BK20	Hukum Siber	2

Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK21	Pembaharuan Hukum Pidana	2



No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
2	BK22	Kebijakan Kriminal	2
3	BK23	Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana	2
4	BK24	Hukum Pidana Internasional	2
5	BK25	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
6	BK26	Viktimologi	2
7	BK27	Perbandingan Hukum Pidana	2
8	BK28	Hukum Pidana Korporasi	2
9	BK29	Hukum Pidana Cyber	2
10	BK30	Kejahatan di Bidang Ekonomi	2
11	BK31	Hukum Pidana Lingkungan	2
12	BK32	Hukum Pidana Militer	2
13	BK33	Kejahatan di Bidang Politik	2
14	BK34	Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak	2

Konsentrasi Hukum Kesehatan

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK35	Hukum Pelayanan Kesehatan	2
2	BK36	Hukum Obat dan Makanan	2
3	BK37	Hukum Rumah Sakit	2
4	BK38	Bioetik dan Hukum Kesehatan	2
5	BK39	Hukum Kesehatan Masyarakat	2
6	BK40	Penegakan Hukum dan penyelesaian sengketa medik	2
7	BK41	Etika Kesehatan	2
8	BK42	Hukum Pidana Kesehatan	2
9	BK43	Hukum Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	2
10	BK44	Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Kesehatan	2
11	BK45	Peradilan Profesi Kesehatan	2
12	BK46	Hukum Pelayanan dan Komunikasi Kesehatan	2
13	BK47	Kapita Selekta Hukum Kesehatan	2
14	BK48	Hukum Perdata Kesehatan	2

**Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik**

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK49	Hukum Acara Administrasi	2
2	BK50	Hukum Administrasi dan Desentralisasi	2
3	BK51	Hukum dan Kebijakan Publik	2
4	BK52	Hukum dan Sistem Pemerintahan	2
5	BK53	Hukum dan Otonomi Daerah	2
6	BK54	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2
7	BK55	Hukum Lingkungan Hidup	2
8	BK56	Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	2
9	BK57	Hukum dan Teori Konstitusi	2
10	BK58	Hukum Perizinan	2
11	BK59	Hukum Profetik	2
12	BK60	Hukum Pemerintahan dan Legislatif	2
13	BK61	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2
14	BK62	Hukum Tentang Lembaga Negara	2

Luaran Akademik Wajib

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK63	Seminar Proposal	4
2	BK64	Publikasi Jurnal (LoA)	4
3	BK65	Tesis	6

Catatan Bobot BK27

Pada daftar bahan kajian di dokumen sumber, bobot SKS BK27 tidak tercetak. Pedoman ini menggunakan bobot 2 SKS berdasarkan matriks pembentukan mata kuliah pada bagian berikutnya dalam dokumen sumber.



6

DISTRIBUSI MATA KULIAH DAN RENCANA STUDI

BAB 6 DISTRIBUSI MATA KULIAH DAN RENCANA STUDI

6.1 Pola Studi Empat Semester

Distribusi kurikulum disusun agar mahasiswa memperoleh fondasi teori dan metodologi pada semester pertama, mendalami konsentrasi pada semester kedua dan ketiga, serta menyelesaikan luaran penelitian pada semester keempat.

Semester I • Mata Kuliah Wajib Dasar

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	BK1	Politik Hukum	2
2	BK2	Teori Hukum	2
3	BK3	Sosiologi Hukum	2
4	BK4	Filsafat Hukum	2
5	BK5	Metodologi Penelitian Hukum	2
6	BK6	Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara	2
Total Semester I			12

Konsentrasi Hukum Bisnis

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
II	BK7	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	2	1
II	BK8	Hukum Pasar Modal	2	2
II	BK9	Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	2	3
II	BK10	Kapita Selekta Hukum Perdata	2	4
II	BK11	Hukum Perdagangan Internasional	2	5
II	BK12	Hukum Ketenagakerjaan	2	6
II	BK13	Hukum Investasi	2	7
III	BK14	Hukum Perbankan	2	8
III	BK15	Hukum Kontrak Dagang Internasional	2	9
III	BK16	Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat	2	10



Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
		Produsen		
III	BK17	Perbandingan Hukum Kontrak	2	11
III	BK18	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	2	12
III	BK19	Kapita Selekta Hukum Jaminan	2	13
III	BK20	Hukum Siber	2	14
Total Konsentrasi Hukum Bisnis			28	14 MK

Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
II	BK21	Pembaharuan Hukum Pidana	2	1
II	BK22	Kebijakan Kriminal	2	2
II	BK23	Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana	2	3
II	BK24	Hukum Pidana Internasional	2	4
II	BK25	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	5
II	BK26	Viktimologi	2	6
II	BK27	Perbandingan Hukum Pidana	2	7
III	BK28	Hukum Pidana Korporasi	2	8
III	BK29	Hukum Pidana Cyber	2	9
III	BK30	Kejahatan di Bidang Ekonomi	2	10
III	BK31	Hukum Pidana Lingkungan	2	11
III	BK32	Hukum Pidana Militer	2	12
III	BK33	Kejahatan di Bidang Politik	2	13
III	BK34	Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak	2	14
Total Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana			28	14 MK

Konsentrasi Hukum Kesehatan

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
II	BK35	Hukum Pelayanan Kesehatan	2	1
II	BK36	Hukum Obat dan	2	2



Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
		Makanan		
II	BK37	Hukum Rumah Sakit	2	3
II	BK38	Bioetik dan Hukum Kesehatan	2	4
II	BK39	Hukum Kesehatan Masyarakat	2	5
II	BK40	Penegakan Hukum dan penyelesaian sengketa medik	2	6
II	BK41	Etika Kesehatan	2	7
III	BK42	Hukum Pidana Kesehatan	2	8
III	BK43	Hukum Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	2	9
III	BK44	Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Kesehatan	2	10
III	BK45	Peradilan Profesi Kesehatan	2	11
III	BK46	Hukum Pelayanan dan Komunikasi Kesehatan	2	12
III	BK47	Kapita Selekta Hukum Kesehatan	2	13
III	BK48	Hukum Perdata Kesehatan	2	14
Total Konsentrasi Hukum Kesehatan			28	14 MK

Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik

Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
II	BK49	Hukum Acara Administrasi	2	1
II	BK50	Hukum Administrasi dan Desentralisasi	2	2
II	BK51	Hukum dan Kebijakan Publik	2	3
II	BK52	Hukum dan Sistem Pemerintahan	2	4
II	BK53	Hukum dan Otonomi Daerah	2	5
II	BK54	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	6
II	BK55	Hukum Lingkungan Hidup	2	7
III	BK56	Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	2	8
III	BK57	Hukum dan Teori	2	9



Semester	Kode	Mata Kuliah	SKS	Urutan
		Konstitusi		
III	BK58	Hukum Perizinan	2	10
III	BK59	Hukum Profetik	2	11
III	BK60	Hukum Pemerintahan dan Legislatif	2	12
III	BK61	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2	13
III	BK62	Hukum Tentang Lembaga Negara	2	14
Total Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik			28	14 MK

6.2 Semester IV • Luaran Akademik Wajib

No.	Kode	Luaran Akademik	SKS
1	BK63	Seminar Proposal	4
2	BK64	Publikasi Jurnal (LoA)	4
3	BK65	Tesis	6
Total Semester IV			14

6.3 Rekapitulasi Beban Studi

Tahap	Komponen	SKS
Semester I	Mata kuliah wajib dasar	12
Semester II	Konsentrasi tahap I	14
Semester III	Konsentrasi tahap II	14
Semester IV	Seminar proposal, publikasi, dan tesis	14
Total	Beban studi kurikulum	54



7

**RANCANGAN
PEMBELAJARAN
SEMESTER****BAB 7 RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER****7.1 Fungsi RPS**

RPS merupakan instrumen operasional yang menghubungkan CPL Program Studi dengan CPMK, indikator, materi pembelajaran, metode, asesmen, bobot penilaian, dan aktivitas mahasiswa. Setiap dosen mengembangkan RPS dengan mempertahankan konsistensi antara capaian, proses pembelajaran, dan evaluasi.

7.2 Komponen Minimum RPS

- identitas mata kuliah, kode, bobot SKS, semester, dan moda pembelajaran;
- rumpun mata kuliah, prasyarat, dosen pengampu, serta deskripsi singkat;
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- rumusan CPMK dan Sub-CPMK yang terukur;
- indikator, teknik dan kriteria penilaian, serta bobot;
- metode pembelajaran daring/luring dan estimasi waktu;
- materi pembelajaran dan referensi;
- rencana aktivitas pembelajaran setiap pertemuan;
- pengesahan oleh dosen pengampu, koordinator mata kuliah, dan Koordinator Program Studi.

7.3 Pendekatan Pembelajaran**Student-Centered Learning**

Mahasiswa menjadi subjek aktif dalam membangun pengetahuan melalui analisis, refleksi, diskusi, dan pengalaman belajar.

Problem-Based Learning

Persoalan hukum aktual digunakan sebagai pemicu pembelajaran, analisis, dan formulasi solusi.

Project-Based Learning

Mahasiswa menghasilkan keluaran terstruktur seperti legal opinion, policy brief, artikel ilmiah, atau rancangan pemecahan masalah.

Case-Based Learning

Putusan, regulasi, kontrak, kebijakan, dan peristiwa hukum dianalisis secara kritis dan kontekstual.

Blended Learning



Pembelajaran memadukan interaksi luring dan daring dengan pemanfaatan LMS, konferensi video, sumber digital, dan asesmen elektronik.

Collaborative Learning

Mahasiswa bekerja dalam tim interdisipliner untuk membangun komunikasi, negosiasi, kepemimpinan, dan tanggung jawab.

7.4 Prinsip Asesmen

- valid: mengukur capaian yang memang dituju;
- objektif: menggunakan kriteria dan rubrik yang jelas;
- transparan: diketahui mahasiswa sejak awal pembelajaran;
- edukatif: memberikan umpan balik untuk perbaikan;
- berkelanjutan: dilakukan secara formatif dan sumatif;
- berintegritas: menjunjung etika akademik dan orisinalitas.



8

LUARAN AKADEMIK DAN
PENYELESAIAN STUDI

BAB 8 LUARAN AKADEMIK DAN PENYELESAIAN STUDI

8.1 Seminar Proposal

Seminar Proposal merupakan salah satu tahapan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Magister (S2) sebagai bagian dari proses penyusunan tesis. Kegiatan ini bertujuan untuk mempresentasikan dan menguji proposal penelitian yang telah disusun oleh mahasiswa di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji, guna memperoleh masukan, kritik, serta saran konstruktif demi penyempurnaan rencana penelitian.

8.2 Publikasi Jurnal (LoA)

Publikasi artikel jurnal merupakan salah satu bentuk luaran akademik yang mencerminkan capaian penelitian dan kontribusi ilmiah penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, publikasi artikel jurnal dengan ketentuan minimal Letter of Acceptance (LOA) terbit menunjukkan bahwa artikel ilmiah yang disusun telah melalui proses seleksi dan penilaian (peer review) oleh pengelola jurnal serta dinyatakan layak untuk diterbitkan.

8.3 Tesis

Penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai karya akhir dalam program studi, mencakup analisis yang komprehensif dan orisinal mengenai topik tertentu dalam bidang hukum.

8.4 Alur Akademik Penyelesaian Studi

Tahap	Kegiatan	Orientasi
1	Pemantapan Topik	Mahasiswa menetapkan isu penelitian sesuai konsentrasi, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan hukum.
2	Penyusunan Proposal	Mahasiswa menyusun rancangan penelitian dengan bimbingan akademik dan metodologis.
3	Seminar Proposal	Proposal dipresentasikan dan diuji untuk memperoleh masukan serta persetujuan perbaikan.
4	Pelaksanaan Penelitian	Mahasiswa mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum/data secara etis dan dapat dipertanggungjawabkan.
5	Publikasi Ilmiah	Hasil penelitian atau bagian substansialnya disusun menjadi artikel dan memperoleh minimal Letter of Acceptance.
6	Penyusunan dan Ujian Tesis	Tesis diselesaikan, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan akademik universitas dan fakultas.
Ketentuan Administratif		Persyaratan rinci pendaftaran seminar proposal,



Tahap	Kegiatan	Orientasi
		publikasi, ujian tesis, format naskah, pembimbingan, dan yudisium mengikuti pedoman pendidikan universitas, ketentuan fakultas, serta prosedur operasional Program Studi yang berlaku.

**A****LAMPIRAN A • DESKRIPSI
BAHAN KAJIAN/MATA
KULIAH****LAMPIRAN A DESKRIPSI BAHAN KAJIAN/MATA KULIAH**

Lampiran ini memuat deskripsi ringkas 65 bahan kajian yang menjadi dasar pembentukan mata kuliah dan luaran akademik Program Studi Magister Hukum.

Mata Kuliah Wajib Dasar

No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
1	BK1	Politik Hukum	Mempelajari interaksi antara hukum dan politik, termasuk proses pembentukan hukum dan pengaruhnya terhadap kebijakan publik.
2	BK2	Teori Hukum	Mengkaji dasar-dasar teoritis dari hukum, mencakup berbagai pandangan tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.
3	BK3	Sosiologi Hukum	Meneliti hukum dari perspektif sosiologis, memahami pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebaliknya.
4	BK4	Filsafat Hukum	Memperdalam pemahaman tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keadilan, moralitas, dan etika dalam hukum.
5	BK5	Metodologi Penelitian Hukum	Membahas teknik dan metode penelitian yang digunakan dalam studi hukum untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang isu hukum.
6	BK6	Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara	Menyelidiki kerangka hukum yang mengatur pertahanan dan keamanan nasional serta kewajiban bela negara.

Konsentrasi Hukum Bisnis

No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
1	BK7	Hukum Perusahaan dan Kepailitan	Memfokuskan pada aspek hukum yang berkaitan dengan operasional perusahaan dan prosedur kepailitan.
2	BK8	Hukum Pasar Modal	Mengkaji regulasi dan praktik dalam pasar modal, termasuk perlindungan investor dan tata kelola perusahaan.
3	BK9	Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	Mempelajari mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa, termasuk arbitrase dan mediasi.



No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
4	BK10	Kapita Selektta Hukum Perdata	Menawarkan studi mendalam tentang topik-topik terpilih dalam hukum perdata, seperti kontrak, tort, dan hak milik.
5	BK11	Hukum Perdagangan Internasional	Mempelajari regulasi, praktik, dan konvensi yang mengatur perdagangan antarnegara.
6	BK12	Hukum Ketenagakerjaan	Mengkaji regulasi yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
7	BK13	Hukum Investasi	Memfokuskan pada aspek hukum investasi lintas batas dan perlindungan investor.
8	BK14	Hukum Perbankan	Analisis regulasi dan operasional lembaga perbankan serta hukum yang terkait.
9	BK15	Hukum Kontrak Dagang Internasional	Studi tentang hukum yang mengatur kontrak dagang di tingkat internasional.
10	BK16	Perlindungan Konsumen dan Tanggung Gugat Produsen	Penjelasan tentang hukum yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen.
11	BK17	Perbandingan Hukum Kontrak	Membandingkan sistem hukum kontrak antar yurisdiksi berbeda.
12	BK18	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Studi tentang regulasi yang mencegah praktik monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat.
13	BK19	Kapita Selektta Hukum Jaminan	Penyelidikan mendalam tentang hukum jaminan dan aplikasinya.
14	BK20	Hukum Siber	Mempelajari aspek hukum yang berkaitan dengan dunia maya, termasuk kejahatan siber dan perlindungan data.

Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana

No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
1	BK21	Pembaharuan Hukum Pidana	Kajian tentang reformasi dan perkembangan dalam hukum pidana untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.
2	BK22	Kebijakan Kriminal	Analisis kebijakan dalam pencegahan dan penanganan kejahatan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan sistem hukum.
3	BK23	Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana	Studi mendalam tentang aspek-aspek tertentu dalam sistem peradilan pidana, termasuk tantangan dan inovasi terkini.
4	BK24	Hukum Pidana Internasional	Pengenalan terhadap hukum yang mengatur kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.



No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
5	BK25	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Eksplorasi hubungan antara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mekanisme internasional dan nasional untuk penegakannya.
6	BK26	Viktimologi	Studi tentang korban kejahatan, termasuk dampak kejahatan terhadap korban dan cara mendukung pemulihan mereka.
7	BK27	Perbandingan Hukum Pidana	Analisis komparatif sistem hukum pidana di berbagai negara, menyoroti perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan terhadap kejahatan dan hukuman.
8	BK28	Hukum Pidana Korporasi	Penelitian tentang tanggung jawab pidana korporasi dan pengaturannya dalam hukum, termasuk pencegahan dan penanganan kejahatan korporat.
9	BK29	Hukum Pidana Cyber	Kajian tentang kejahatan siber dan regulasi hukum yang berlaku untuk menanggulangi masalah keamanan informasi dan data.
10	BK30	Kejahatan di Bidang Ekonomi	Analisis tentang kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang, penipuan, dan korupsi, serta upaya pencegahan dan penegakan hukumnya.
11	BK31	Hukum Pidana Lingkungan	Studi tentang hukum yang mengatur perlindungan lingkungan melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan.
12	BK32	Hukum Pidana Militer	Kajian mengenai hukum pidana khusus yang berlaku untuk anggota militer, termasuk pelanggaran dan prosedur peradilan militer.
13	BK33	Kejahatan di Bidang Politik	Analisis tentang kejahatan politik, termasuk korupsi dan manipulasi kekuasaan, serta mekanisme hukum untuk mengatasinya.
14	BK34	Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak	Eksplorasi reformasi hukum yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi anak dalam sistem peradilan.

Konsentrasi Hukum Kesehatan

No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
1	BK35	Hukum Pelayanan Kesehatan	Studi tentang regulasi dan prinsip hukum yang mengatur pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat.
2	BK36	Hukum Obat dan Makanan	Kajian tentang regulasi yang mengatur keamanan, kualitas, dan distribusi obat serta makanan.



No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
3	BK37	Hukum Rumah Sakit	Analisis aspek hukum yang berkaitan dengan operasional dan manajemen rumah sakit.
4	BK38	Bioetik dan Hukum Kesehatan	Penyelidikan tentang isu etis dalam biomedis dan kesehatan, serta regulasi hukum yang relevan.
5	BK39	Hukum Kesehatan Masyarakat	Kajian tentang hukum yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat luas.
6	BK40	Penegakan Hukum dan penyelesaian sengketa medik	Studi tentang proses hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam konteks medis dan kesehatan.
7	BK41	Etika Kesehatan	Mempelajari prinsip-prinsip etika dalam praktik kesehatan, termasuk dilema moral dan pengambilan keputusan etis.
8	BK42	Hukum Pidana Kesehatan	Kajian tentang aplikasi hukum pidana dalam konteks kesehatan, termasuk pelanggaran dan sanksi.
9	BK43	Hukum Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Analisis hukum yang mengatur pembiayaan kesehatan dan sistem jaminan kesehatan.
10	BK44	Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Kesehatan	Penelitian tentang interaksi antara hukum, hak asasi manusia, dan kesehatan.
11	BK45	Peradilan Profesi Kesehatan	Studi tentang peradilan dan regulasi dalam praktik profesi kesehatan.
12	BK46	Hukum Pelayanan dan Komunikasi Kesehatan	Kajian mengenai hukum yang berlaku untuk pelayanan dan komunikasi dalam bidang kesehatan.
13	BK47	Kapita Selekta Hukum Kesehatan	Penyelidikan topik-topik pilihan dalam hukum kesehatan yang relevan dengan isu kontemporer.
14	BK48	Hukum Perdata Kesehatan	Analisis tentang aplikasi hukum perdata dalam konteks kesehatan, termasuk kontrak dan tanggung jawab sipil.

Konsentrasi Hukum dan Kebijakan Publik

No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
1	BK49	Hukum Acara Administrasi	Studi tentang prosedur dan prinsip hukum administrasi, termasuk penyelesaian sengketa administratif.
2	BK50	Hukum Administrasi dan Desentralisasi	Kajian tentang hukum administrasi publik dan dampak desentralisasi pada pengelolaan pemerintahan.
3	BK51	Hukum dan Kebijakan Publik	Penelitian tentang peran hukum dalam pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.



No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
4	BK52	Hukum dan Sistem Pemerintahan	Kajian mengenai struktur, fungsi, dan interaksi antara elemen-elemen dalam sistem pemerintahan, serta peran hukum dalam pengaturannya.
5	BK53	Hukum dan Otonomi Daerah	Analisis mengenai hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah otonom, termasuk kewenangan, pembiayaan, dan administrasi.
6	BK54	Hukum dan Hak Asasi Manusia	Penelitian tentang perlindungan, penegakan, dan pengembangan hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional dan internasional.
7	BK55	Hukum Lingkungan Hidup	Kajian tentang regulasi hukum yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak lingkungan.
8	BK56	Hukum Pengelolaan Keuangan Negara	Analisis mengenai hukum yang mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk perencanaan, pengeluaran, dan pengawasan anggaran.
9	BK57	Hukum dan Teori Konstitusi	Studi tentang teori, prinsip, dan praktik konstitusi, serta peran hukum dalam mendukung struktur pemerintahan konstitusional.
10	BK58	Hukum Perizinan	Penelitian tentang proses perizinan dalam konteks hukum administrasi dan industri tertentu.
11	BK59	Hukum Profetik	Kajian tentang konsep hukum profetik dalam konteks keadilan sosial, etika, dan penegakan hukum.
12	BK60	Hukum Pemerintahan dan Legislatif	Analisis mengenai peran hukum dalam fungsi dan proses pemerintahan dan legislasi, termasuk hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
13	BK61	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Penelitian tentang peraturan hukum yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah atau entitas lainnya, termasuk proses tender, kontrak, dan pengelolaan risiko.
14	BK62	Hukum Tentang Lembaga Negara	Kajian tentang hukum yang mengatur pendirian, struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara, seperti parlemen, presiden, dan badan eksekutif lainnya.



Luaran Akademik Wajib

No.	Kode	Bahan Kajian	Deskripsi
1	BK63	Seminar Proposal	Seminar Proposal merupakan salah satu tahapan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Magister (S2) sebagai bagian dari proses penyusunan tesis. Kegiatan ini bertujuan untuk mempresentasikan dan menguji proposal penelitian yang telah disusun oleh mahasiswa di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji, guna memperoleh masukan, kritik, serta saran konstruktif demi penyempurnaan rencana penelitian
2	BK64	Publikasi Jurnal (LoA)	Publikasi artikel jurnal merupakan salah satu bentuk luaran akademik yang mencerminkan capaian penelitian dan kontribusi ilmiah penulis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, publikasi artikel jurnal dengan ketentuan minimal Letter of Acceptance (LOA) terbit menunjukkan bahwa artikel ilmiah yang disusun telah melalui proses seleksi dan penilaian (peer review) oleh pengelola jurnal serta dinyatakan layak untuk diterbitkan.
3	BK65	Tesis	Penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai karya akhir dalam program studi, mencakup analisis yang komprehensif dan orisinal mengenai topik tertentu dalam bidang hukum.



LAMPIRAN B MATRIKS KETERKAITAN PL, TPP, DAN CPL

Matriks berikut menyajikan hubungan inti antara profil lulusan, Tujuan Pendidikan Program Studi, dan Capaian Pembelajaran Lulusan. Tanda centang menunjukkan dukungan langsung.

B.1 Matriks Profil Lulusan dan Tujuan Pendidikan Program Studi

Profil Lulusan	TPP-1	TPP-2	TPP-3
PL-1 • Ahli dan Praktisi Hukum Keamanan Nasional	✓	✓	✓
PL-2 • Analis Kebijakan dan Advokat Hukum Nasional-Internasional	✓	✓	✓
PL-3 • Akademisi dan Peneliti Hukum	✓	✓	✓

B.2 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dan Tujuan Pendidikan Program Studi

Kode	Deskripsi CPL	TPP-1	TPP-2	TPP-3
CPL-1	Mampu menunjukkan integritas profesional dan etika hukum yang tinggi, dengan berpedoman pada prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek praktik hukum.	✓	✓	✓
CPL-2	Mampu memiliki pemahaman komprehensif dan mendalam tentang prinsip dan teori hukum, serta menerapkannya dalam praktik, termasuk pengetahuan mengenai sistem hukum internasional dan perbandingan hukum.	✓	✓	✓
CPL-3	Mampu menganalisis masalah hukum secara kritis, mengembangkan solusi berdasarkan penalaran logis dan etis, serta mengevaluasi implikasi hukum dari berbagai situasi kompleks.	✓	✓	✓
CPL-4	Mampu melakukan penelitian hukum yang inovatif dan etis serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui hasil yang diakui pada tingkat	✓	✓	✓



Kode	Deskripsi CPL	TPP-1	TPP-2	TPP-3
	nasional maupun internasional.			
CPL-5	Mampu berkomunikasi secara efektif dan persuasif dalam berbagai konteks profesional serta bekerja sama dengan tim interdisipliner untuk mencapai solusi hukum yang optimal.	✓	✓	✓
CPL-6	Mampu beradaptasi dengan perubahan dalam bidang hukum dan teknologi serta berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan.	✓	✓	✓
CPL-7	Mampu memimpin dan mengelola proyek hukum secara efektif dengan memadukan visi strategis dan tindakan praktis.	✓	✓	✓
CPL-8	Mampu menunjukkan pemahaman yang luas tentang isu hukum global, menghargai keberagaman budaya, dan beroperasi dalam lingkungan hukum internasional dengan sensitivitas dan profesionalisme.	✓	✓	✓

B.3 Matriks Ringkas CPL dan Profil Lulusan

Kode	Deskripsi CPL	PL-1	PL-2	PL-3
CPL-1	Mampu menunjukkan integritas profesional dan etika hukum yang tinggi, dengan berpedoman pada prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aspek praktik hukum.	✓	✓	✓
CPL-2	Mampu memiliki pemahaman komprehensif dan mendalam tentang prinsip dan teori hukum, serta menerapkannya dalam praktik, termasuk pengetahuan mengenai sistem hukum internasional dan perbandingan hukum.	—	✓	✓
CPL-3	Mampu menganalisis masalah hukum secara kritis, mengembangkan solusi	✓	✓	✓



Kode	Deskripsi CPL	PL-1	PL-2	PL-3
	berdasarkan penalaran logis dan etis, serta mengevaluasi implikasi hukum dari berbagai situasi kompleks.			
CPL-4	Mampu melakukan penelitian hukum yang inovatif dan etis serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum melalui hasil yang diakui pada tingkat nasional maupun internasional.	—	—	✓
CPL-5	Mampu berkomunikasi secara efektif dan persuasif dalam berbagai konteks profesional serta bekerja sama dengan tim interdisipliner untuk mencapai solusi hukum yang optimal.	✓	✓	✓
CPL-6	Mampu beradaptasi dengan perubahan dalam bidang hukum dan teknologi serta berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan.	—	—	✓
CPL-7	Mampu memimpin dan mengelola proyek hukum secara efektif dengan memadukan visi strategis dan tindakan praktis.	✓	✓	—
CPL-8	Mampu menunjukkan pemahaman yang luas tentang isu hukum global, menghargai keberagaman budaya, dan beroperasi dalam lingkungan hukum internasional dengan sensitivitas dan profesionalisme.	✓	✓	✓



LAMPIRAN C CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Contoh berikut disarikan dari RPS mata kuliah Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara pada dokumen kurikulum sumber. Format dapat disesuaikan dengan template resmi universitas tanpa mengubah konsistensi CPL, CPMK, aktivitas pembelajaran, dan asesmen.

C.1 Identitas Mata Kuliah

Komponen	Keterangan
Nama Mata Kuliah	Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara
Rumpun Mata Kuliah	Hukum
Bobot	2 SKS
Semester	1
Moda Pembelajaran	Blended
Metode	Diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, kooperatif, berbasis proyek, dan berbasis masalah
Model	PBL, PjBL, Tutorial
Prasyarat	-
Dosen Pengampu	Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.; Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.

C.2 Deskripsi Mata Kuliah

	Deskripsi Singkat Mata kuliah dirancang agar mahasiswa mempunyai kemampuan memformulasi hukum pertahanan, keamanan, dan bela negara sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan tindakan yang mengancam kepentingan nasional.
--	--

C.3 CPL dan CPMK

CPL	Kode CPMK	Rumusan CPMK	Bobot
CPL-4	CPMK 1	Memahami tujuan, materi, proses, tugas, sumber, penilaian, serta konsep pertahanan dan keamanan nasional.	30%
CPL-4	CPMK 2	Memahami isu global dan ancaman keamanan	10%



CPL	Kode CPMK	Rumusan CPMK	Bobot
		lintas negara.	
CPL-4	CPMK 3	Menjelaskan kedudukan dan fungsi konsepsi ketahanan nasional serta konsep pertahanan.	10%
CPL-8	CPMK 1	Menganalisis keamanan nontradisional dan alternatif serta konsepsi keamanan Indonesia melalui doktrin ketahanan nasional.	30%
CPL-8	CPMK 2	Menjelaskan problem keamanan kontemporer di Indonesia dan kewajiban bela negara.	10%
CPL-8	CPMK 3	Menjelaskan nilai bela negara dan bentuk upaya pembelaan negara.	10%

C.4 Rencana Aktivitas Pembelajaran Ringkas

Pertemuan	Substansi	Metode	Bobot
1–2	Orientasi perkuliahan; pengertian, asas, komponen pertahanan dan keamanan nasional; partisipasi warga negara.	Ceramah interaktif, diskusi, LMS	30%
3–4	Isu global, ancaman lintas negara, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan hubungan internasional.	Diskusi kasus, tanya jawab	10%
5–7	Pancagatra, redefinisi doktrin, pembagian wewenang, strategi pertahanan, kedudukan dan hakikat ketahanan nasional.	PBL, penugasan/publikasi	10%
8–9	Keamanan nontradisional dan alternatif; doktrin ketahanan nasional.	Case-based learning	30%
10–11	Problem keamanan kontemporer dan kewajiban bela negara.	Diskusi, analisis kebijakan	10%
12–14	Arti dan nilai bela negara, hakikat pertahanan, bentuk upaya pembelaan negara, dan ancaman terhadap kedaulatan.	PjBL, presentasi	10%



PENUTUP

Pedoman Akademik dan Kurikulum ini menjadi pijakan bersama dalam menyelenggarakan pendidikan hukum tingkat magister yang unggul, berintegritas, berkarakter bela negara, dan responsif terhadap tantangan hukum. Implementasi pedoman memerlukan konsistensi antara kebijakan, proses pembelajaran, asesmen, penelitian, publikasi, layanan akademik, dan penjaminan mutu.

Penyempurnaan pedoman dilaksanakan secara berkala melalui evaluasi kurikulum, masukan sivitas akademika, hasil IKM dan tracer study, perkembangan ilmu hukum, kebutuhan pemangku kepentingan, serta perubahan kebijakan pendidikan tinggi.

Sumber Utama

Dokumen Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, periode 2023–2028, ditetapkan di Surabaya pada 1 Desember 2023.